



Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa
Barat



Balikpapan, 6 Desember 2023

STRATEGI PENGELOLAAN PI 10%

Disampaikan Oleh:

LUSI LESMININGWATI, S.E., M.M.
Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

DASAR HUKUM PARTICIPATING INTEREST (PI) 10%



PERMEN ESDM NO. 15 TAHUN 2015

- BUMD dapat menjadi mitra pemegang PI paling banyak 10% berdasarkan kelaziman bisnis (Pasal 11, huruf c);
- Kepemilikan saham 100% dimiliki oleh negara (pasal 4 ayat 3 huruf e)



PERMEN ESDM NO. 37 TAHUN 2016

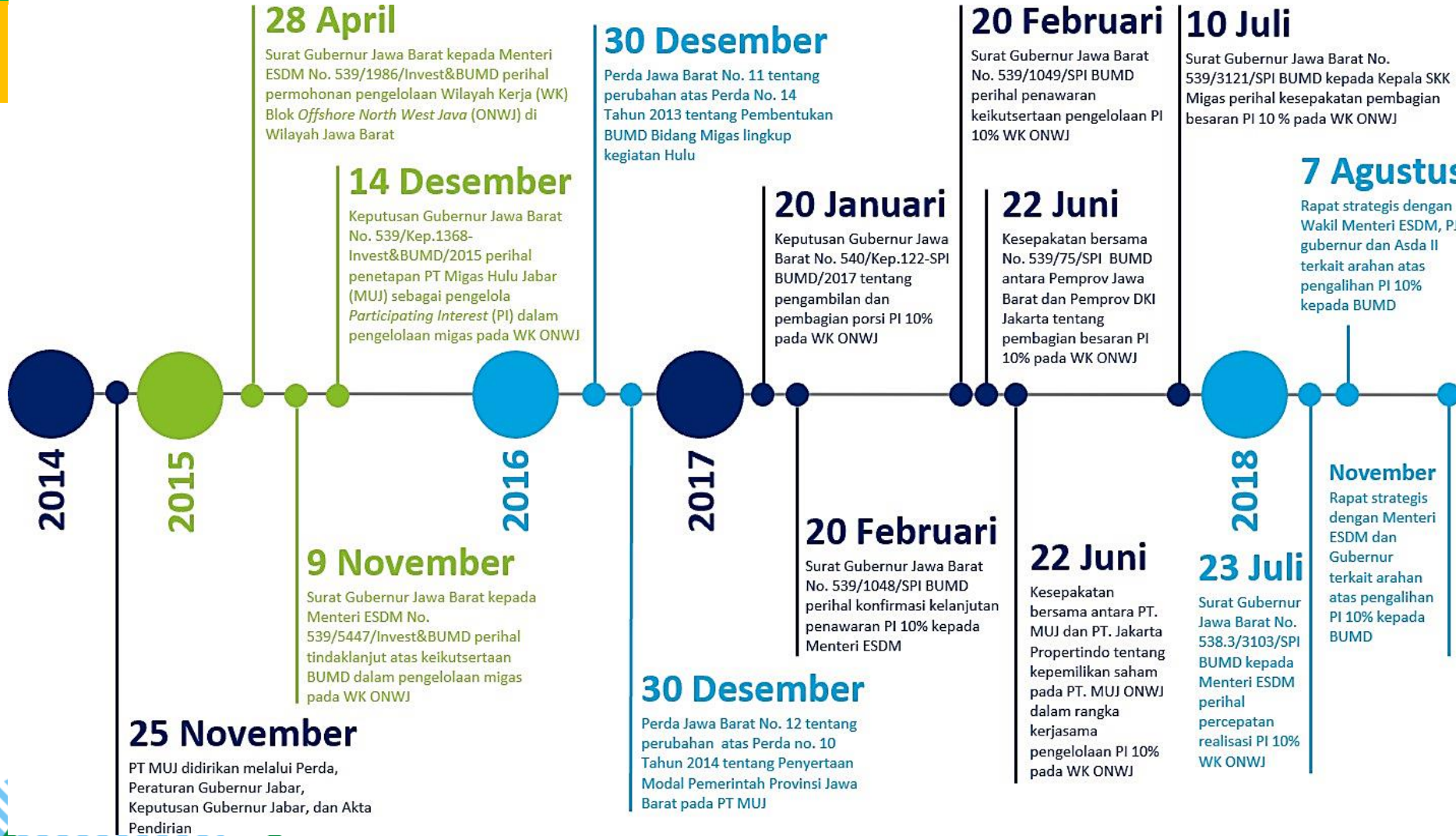
- BUMD berbentuk Perusahaan Daerah yang **seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah**, atau perseroan terbatas yang **paling sedikit 99%** sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah (pasal 3 huruf a)
- Setiap BUMD hanya diberikan pengelolaan PI 10% untuk **1 (satu) Wilayah Kerja** (Pasal 7 ayat 1);



KEPMEN ESDM No.223.K/MG.01 /MEM/2022

- SKK Migas dan BPMA melakukan **pengawasan dan pengendalian** terhadap **penawaran atau pelaksanaan PI 10%**.
- SKK Migas atau BPMA memberikan rekomendasi kepada Menteri berupa usulan tindakan penyelesaian atau sanksi

RESUME TIMELINE PERCEPATAN PI 10%



KETERANGAN	
1.	Dibutuhkan 2 tahun dan 4 Peraturan Daerah untuk menyesuaikan perubahan Peraturan terkait PI 10%
2.	2 tahun untuk menjalin kesepahaman dengan Daerah lain.
3.	6 bulan khusus negosiasi ketat dengan Pemprov DKI Jakarta
4.	Setelahnya 2 tahun kemudian PI 10% dinikmati oleh Jawa Barat

PI WILAYAH KERJA OFFSHORE NORTH WEST JAVA (WK ONWJ)

PT Migas Hulu Jabar (MUJ) telah berhasil menjadi **BUMD** pelopor dan implementator pertama di Indonesia untuk mendapatkan hak PI sesuai Permen ESDM 37/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016

PI 10%

Participating Interest (PI) 10% adalah besaran maksimal 10% PI pada KKS yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada BUMD atau BUMN.



Bertujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam pengelolaan migas



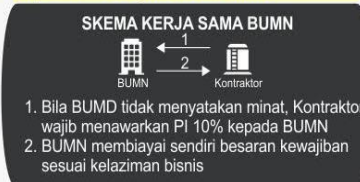
Kepemilikan saham BUMD dan PI 10% tidak bisa diperjualbelikan /dialihkan/dijaminikan



BUMD disahkan melalui Perda dan berbentuk Perusda (100% Pemda) atau Perseroan Terbatas (minimal 99% Pemda dan sisanya terafiliasi dengan Pemda)



BUMD khusus mengelola PI 10%, dan satu BUMD hanya mengelola satu PI 10%

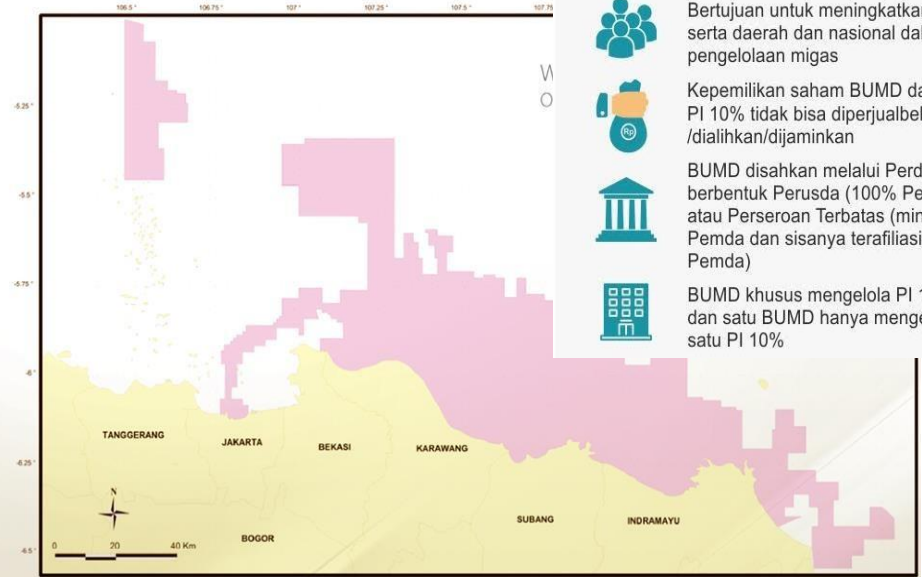


**PEMERINTAH
PROVINSI
JAWA BARAT**

DPRD PROVINSI
JAWA BARAT



62.33%	PT. Migas Hulu Jabar	
20.29%	PT. Jakarta Propertindo	
8.24%	PD. Petrogas Persada Karawang	
4.71%	PD. Bumi Wiralodra Indramayu	
2.98%	PT. Subang Sejahtera	
1.7%	PT. Bina Bangun Wibawa Mukti	



Kontrak baru WK ONWJ dimulai pada
19 Januari 2017

STRATEGI PENGELOLAAN PI 10% (1)



- ❑ **Dividen kepada Pemegang Saham (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) untuk PAD dari kekayaan daerah yang dipisahkan**

Kontribusi Deviden PT MUJ terhadap PAD s.d T.B. 2022

Bahwa berdasarkan hasil RUPS Tahun Buku 2022, Deviden yang sudah disetorkan pada tahun buku 2022 sebesar

Rp 105 Miliar

sehingga total kontribusi deviden BUMD terhadap PAD sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar

Rp 284,2 Miliar

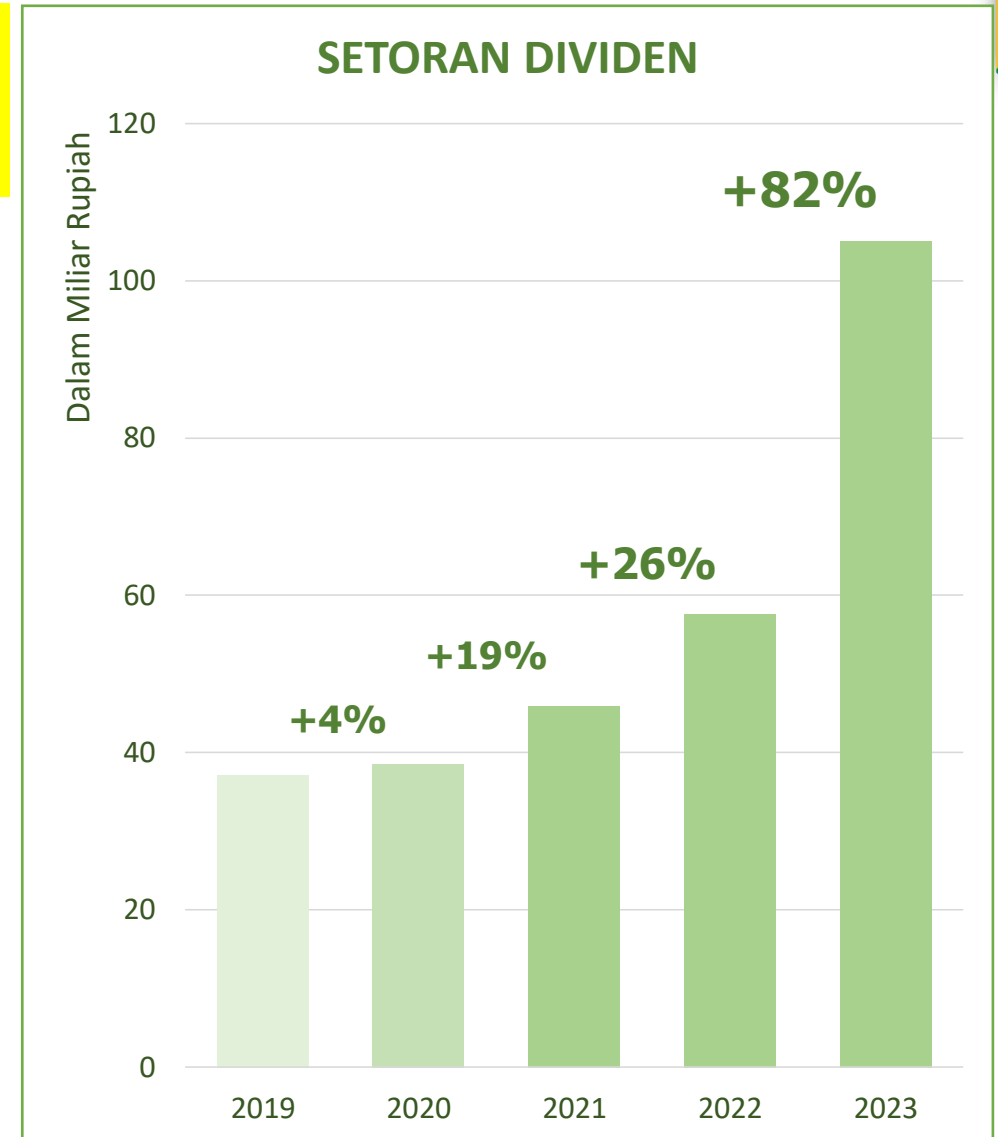
Penyertaan Modal kepada PT Migas Utama Jabar

Berdasarkan Proporsi Modal/Saham sesuai dengan Perda, Total Realisasi Penyertaan Modal pada PT Migas Utama Jabar sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar

Rp 35 Miliar

Adapun sisa porsi saham yang dapat dipenuhi oleh

● ● Pemprov sebesar **Rp 105 Miliar**



STRATEGI PENGELOLAAN PI 10%

Mendorong transformasi PT Migas Hulu Jabar menjadi PT Migas Utama Jabar sebagai BUMD Holding Energi melalui Perda No.3/2022 dan rencana bisnis yang sesuai dengan arah perkembangan bisnis energi dalam kerangka sebagai BUMD holding bisnis energi

Migas Hulu Jabar

Bidang Usaha:

- Eksplorasi & Produksi Migas
- Jasa Penunjang migas

Modal Dasar:

Rp. 50 Miliar

Migas Utama Jabar

Bidang Usaha: (holding energi)

- Hulu Migas
- Hilir Migas
- EBTKE
- Jasa Penunjang ESDM

Perubahan Modal Dasar:

Rp. 140 Miliar

PT MUJ (PT Migas Hulu Jabar)

Perda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan BUMD Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu

- Mengusahakan potensi Sumberdaya alam minyak & gas bumi di daerah & mengoptimalkan peluang pengusahaan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

- Komposisi saham Pemprov Jabar 70% dari modal dasar 50M

Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Migas Hulu Jabar

- Komposisi saham Pemprov 70% adalah Rp. 35M
- Modal Dasar dapat ditingkatkan paling tinggi 2 T



PT MUJ (PT Migas Hulu Jabar)

Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Migas Hulu Jabar

- Komposisi saham Pemprov 70% adalah Rp. 35M
- Modal Dasar dapat ditingkatkan paling tinggi 2 T

Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kesatu Perda No. 10 Th. 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemprov Jabar pada Migas Hulu Jabar

- Perubahan Porsi Kepemilikan Pemprov Jabar menjadi 100%
- Sisa pemenuhan Modal Dasar 15M



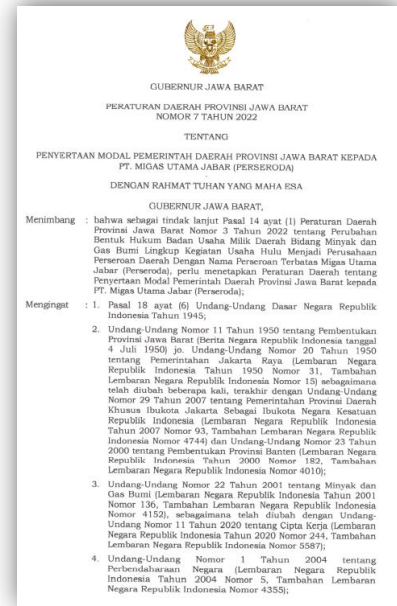
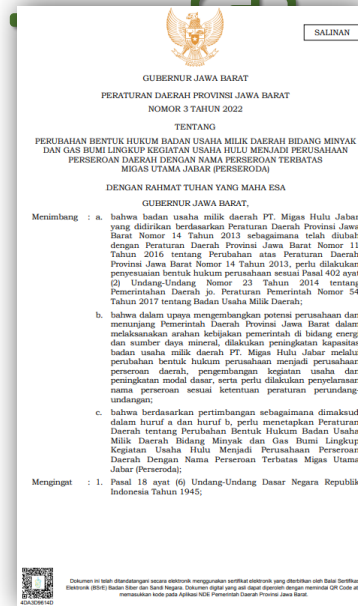
PT MUJ (PT Migas Utama Jabar)

Perda 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dengan Nama Perseroan Terbatas Migas Utama Jabar (Perseroda)

- Kegiatan usaha BUMD bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral yang mencakup kegiatan usaha dalam bidang hilir minyak dan gas bumi, energi terbarukan, ketenagalistrikan, dan mineral dan batubara berikut Kegiatan Jasa Penunjangnya dengan bentuk Perseroan.
- Perubahan Modal Dasar ditetapkan menjadi Rp. 140M

• Sisa Pemenuhan Modal Rp. 105 M dengan tahapan:

1. 2023: Rp. 30 M
2. 2024: Rp. 35M
3. 2025: Rp. 40 M



PROGRAM KERJA BISNIS

RB 2019-2023			
NO	ENTITAS	KEGIATAN USAHA	REALISASI
1	MUJ ONWJ	Pengelolaan WK ONWJ (PI 10%)	Pengalihan PI Tahun 2019, efektif sejak 2017
2	ENM	• Engineering, Procurement, Construction (EPC) • Keagengan LPG Subsidi (3 Kg)	DRUPS, Rig Compressor Piping, Support Facility Dan EPC lainnya 3 lokasi dari 14 lokasi yang direncanakan
3	MUJI	• KSO Lapangan Migas • Jasa Konsultan • Distribusi Gas (CNG, LNG) • Pembangkit (PLTM, PLTS) • EV & EV Charging • Mineral	KSO Pabuaran, Konsultan PI, G&G Reaktivasi CNG Pasir Jadi Kerjasama PLTM Cirompang Sewa EV (8 unit), Jasa pertambangan Batuan

RB 2024-2028

NO	ENTITAS	KEGIATAN USAHA	KETERANGAN
1	MUJ ONWJ	-Pengelolaan WK ONWJ (PI 10%) yang lebih Pro-Aktif dalam rangka <i>transfer knowledge</i> -Kolaborasi kegiatan TJSJ dari Anggaran WP&B -keikutsertaan dalam Proyek Migas WK ONWJ yang akan dilakukan oleh Afiliasi MUJ Grup	-Upaya mempertahankan & meningkatkan laju produksi -Meningkatkan pendapatan melalui kegiatan proyek yang dilakukan oleh afiliasi
2	ENM	Jasa Penunjang - Migas - Ketenagalistrikan & EBT - Pertambangan	Jasa Konstruksi Jasa Non Konstruksi Pengadaan
3	MUJI	KSO Lapangan Migas Distribusi Gas EBTKE dan Ketenagalistrikan (PLTM, PLTS, Lainnya)	KSO Pabuaran, KSO Lainnya Scale up volume CNG LNG Gas Pipa PLTM PLTS Sumber EBT Lainnya
		EV & EV Charging Mineral	Fase Scale up EV & EVC Pertambangan Mineral & Batuan

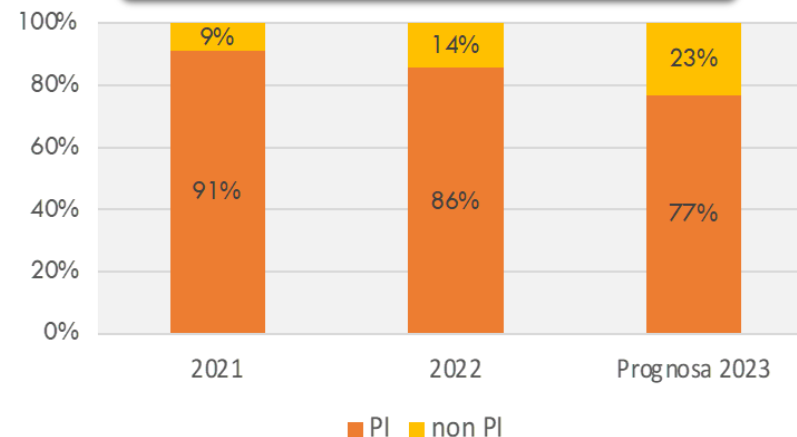


STRATEGI PENGELOLAAN PI 10%

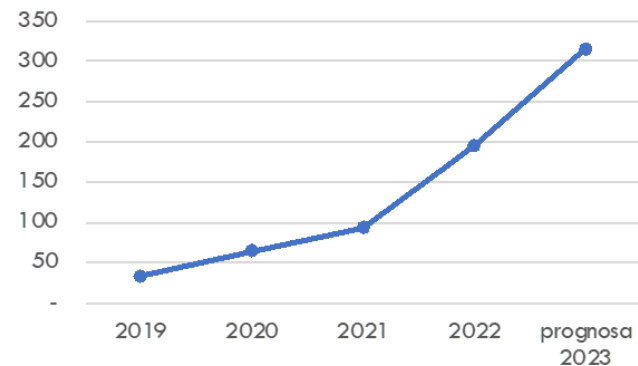
Mendorong Pengembangan Bisnis Non PI dan Pertumbuhan Perusahaan



KOMPOSISI PENDAPATAN PT MUJ



TREN PENDAPATAN NON PI



CATATAN

Pendapatan PI merupakan salah satu sumber pendapatan yang diandalkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembiayaan pembangunan

Sumber minyak yang menjadi sumber PI adalah sumur – sumur tua/marjinal yang secara umur produksi menurun sehingga untuk mempertahankan produksi diperlukan investasi yang besar yang dapat mempengaruhi pendapatan PI

Daya tawar penerima PI yang lemah dihadapan kontraktor pemegang WK khususnya dalam penyusunan rencana kerja (terkait penyusunan proyeksi dan beban), sehingga BUMD penerima PI tidak dapat ikut menentukan proyeksi dan realisasi besaran penerimaan dari WK kontraktor





TERIMA KASIH

